

## Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tegalsari Kota Surabaya

Trifandy Juniar<sup>1</sup>; Lukman Arif<sup>2,\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia; [lukman\\_arif.adneg@upnjatim.ac.id](mailto:lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id)

\*Correspondence : [lukman\\_arif.adneg@upnjatim.ac.id](mailto:lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi PKH di Kelurahan Tegalsari. Berdasar pada beberapa artikel yang melaporkan bahwa terdapat puluhan warga Tegalsari yang mengadu kepada DPRD mengenai ketidakjelasan Program Keluarga Harapan yang diterapkan di Kelurahan Tegalsari, menarik minat peneliti untuk menyelidiki dan menganalisis kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Informan yang dipilih sebagai objek informasi adalah beberapa dari pihak Dinas Sosial Kota Surabaya dan keluarga penerima manfaat di Kelurahan Tegalsari. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi menurut Dunn (2003), yang terdiri dari 6 indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari masih belum memenuhi kriteria dalam hal efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan ketepatan. Meskipun demikian, dalam hal responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penilaian terhadap program tersebut cukup baik. Namun, evaluasi kebijakan program Keluarga Harapan di Kelurahan Tegalsari masih dianggap masih kurang maksimal.

### ABSTRACT

This study aims to describe the evaluation of the *Keluarga Harapan Program* (PKH) in Tegalsari Village. Based on several articles reporting that dozens of Tegalsari resident complained to the DPRD about the ambiguity of the Family Hope Program implemented in Tegalsari Village, researchers were interested in investigating and analyzing the conditions that occurred in the field. In this study, a descriptive qualitative approach was used using data collection methods such as interviews, observations, and documentation. The data used consisted of two types, namely primary data and secondary data. Informants selected as objects of information were some from the Surabaya City Social Service and beneficiary families in Tegalsari Village. The theory used is the evaluation theory according to Dunn (2003), which consists of six indicators, namely effectiveness, efficiency, sufficiency, equality, responsiveness, and accuracy. From the results of the study, it is concluded that the implementation of the PKH in Tegalsari Village still does not meet the criteria in terms of effectiveness, efficiency, sufficiency, equality, and accuracy. Nevertheless, in terms of responsiveness to community needs, the assessment of the program is quite good. However, the evaluation of the Family Hope Program policy in Tegalsari Village is still considered to be suboptimal.

### Kata kunci

*Evaluasi, Kelurahan Tegalsari, Program Keluarga Harapan*

### Keywords

*Evaluation, Tegalsari Village, Keluarga Harapan Programm*

## Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Dengan jumlah lebih dari 17.504 pulau, Letak geografisnya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati (Mun'im, 2022). Kekayaan tersebut tentunya jika dimanfaatkan semaksimal mungkin dapat membawa negara ini ke arah lebih baik. Meskipun demikian, Indonesia masih termasuk dalam kategori negara berkembang dan terdapat banyak spekulasi seputar masalah sosial, budaya, dan ekonomi yang memerlukan analisis yang lebih mendalam (Sari et al., 2022). Permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia salah satu yakni masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan menjadi hambatan dalam pembangunan karena kompleksitasnya yang sangat besar, sehingga negara sulit untuk mengatasi kemiskinan tanpa bantuan dari pihak lain. Artinya, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara holistik dan dengan dukungan semua pihak (Royat, 2015).

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 51/07/Th. XXV,15 Juli 2022 menunjukkan bahwa jumlah persentase penduduk miskin di Indonesia sedikit mengalami penurunan. Diketahui bahwa 10 tahun terakhir dari September 2011 hingga September 2021 jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia tiap tahun mengalami perubahan yang dihitung hingga saat ini cenderung mengalami penurunan. Penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 24,78 juta penduduk miskin atau setara dengan 9,22% terjadi pada periode September 2019. Akan tetapi pada periode Maret 2020 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami kenaikan hingga mencapai 26,42 juta jiwa setara dengan 9,78%. Kemudian kembali mengalami kenaikan pada periode September 2020 dengan jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta jiwa setara dengan 10,19%. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin tersebut terjadi karena beberapa faktor adanya pandemi yang melanda Indonesia, dengan kondisi dua tahun belakangan ini penyebaran dari wabah virus *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, yang semakin menyulitkan tingkat perekonomian masyarakat.

Menyikapi hal kenaikan angka kemiskinan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan program yang sekiranya dapat membantu menaikkan taraf kehidupan masyarakat, seperti. dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program ini dimaksudkan pada Pasal 1 Ayat (1) yaitu “ Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang telah terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH “Program Keluarga Harapan ditujukan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan diperoleh dari Basis Data Terpadu(Sudirman, Basri, Huda, & Upe, 2020).

Sebagai program yang dirancang secara terpusat, PKH melibatkan banyak aspek dan pihak dalam pelaksanaannya, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan dari aturan selama implementasi program. Sama halnya dengan kebijakan pemerintah terkait PKH, pelaksanaannya di tingkat lokal juga dapat menghadapi banyak permasalahan. Seperti halnya pada penelitian ini, timbul masalah dalam penerimaan bantuan PKH pada wilayah Kelurahan Tegalsari Kota Surabaya seperti hal tidak konsistennya penerimaan bantuan PKH. Pada penerimaan bantuan lain berbentuk sembako ada yang mempunyai kartu sembako akan tetapi tidak memperoleh sembako. Begitupula sebaliknya bantuan uang tunai setiap yang di terima peserta PKH selalu menurun dengan tidak adanya penjelasan secara langsung oleh pendamping sehingga ibu rumah tangga serta warga setempat berbondong-bondong mendatangi kantor DPRD Kota Surabaya untuk mengadu terkait permasalahan PKH ini.

Dalam proses pelaksanaan PKH di Tegalsari benar terdapat kegiatan pertemuan antara Pendamping PKH dengan Keluarga Penerima Manfaat, akan tetapi tidak atas sepengetahuan ketua RT/RW setempat yang menyebabkan ketidakpahaman ketua RT/RW mengenai fasilitas, ketepatan waktu, serta hal yang didapatkan dari kegiatan pertemuan yang dilakukan Pendamping PKH tersebut. Kurang bersinerginya pendamping PKH dengan RT/RW setempat membuat warga yang merasa berhak tapi belum mendapatkan bantuan menjadi bingung untuk menyampaikan keluhannya, sehingga membuat warga untuk membawa masalah ini ke Dewan. Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menanggapi aduan warga Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegalsari terkait beberapa hal yang disampaikan kepada wakil rakyat. Komisi D DPRD Kota Surabaya menambahkan bahwa sudah selayaknya apabila ada surveyor baik itu dari Dinas Sosial atau pendamping PKH ketika akan melakukan survey di sebuah kampung harusnya bersinergi dengan RT atau RW setempat. Hal itu akan dijadikan bahan evaluasi dewan untuk melayani warga Kota Pahlawan ini lebih baik lagi.

Studi-studi sebelumnya yang mengulas evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memberikan pandangan berharga tentang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial di berbagai wilayah. Namun, penelitian yang diusulkan memiliki ciri khas yang membedakannya, mendorong untuk lebih mendalaminya. Meskipun penelitian pertama (Rifqi Fauzan Dwi Cahya, 2019) mengidentifikasi masalah pemahaman masyarakat dan kendala akses, penelitian ini akan fokus pada pemberdayaan dan penyuluhan keluarga (P2K2) di pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari. Ini akan memberi wawasan lebih mendalam tentang meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya melalui pendekatan pemberdayaan keluarga. Sementara studi kedua (Yustina, 2021) menyoroti pentingnya meningkatkan pemahaman dan mengurangi ketergantungan, penelitian ini akan mengeksplorasi pemberdayaan keluarga lebih rinci, mencari solusi inovatif untuk hambatan tersebut guna meningkatkan efisiensi

pelaksanaan program. Meskipun penelitian ketiga (Ade Kurniawan et al., 2021) telah mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi PKH, penelitian ini akan meneliti efisiensi melalui P2K2 dan dampak jangka panjangnya. Sementara penelitian keempat (Firdausi & Hertati, 2022) mengkaji evaluasi BPNT, penelitian ini akan mendalami pendekatan pemberdayaan keluarga dalam PKH, memberikan wawasan baru tentang peningkatan efisiensi dan efektivitas program bantuan sosial. Secara keseluruhan, penelitian ini mengisi celah dengan menggali pengaruh pemberdayaan keluarga terhadap efisiensi pelaksanaan program bantuan sosial, berpotensi memberikan solusi lebih mendalam dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan jangka panjang program PKH.

Hal yang sangat penting pada pelaksanaan suatu program salah satunya ialah evaluasi. Tujuan adanya evaluasi dalam suatu program ialah untuk mengetahui hasil dan perkembangan dari program tersebut, serta untuk membandingkan pengaruh suatu program yang bertujuan sebagai sarana untuk membantu pengambilan keputusan serta untuk meningkatkan program yang akan datang. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan memberi bukti nyata dalam pelaksanaan program dengan tercapainya tujuan berdasarkan kriteria evaluasi yakni berdasarkan masalah yang telah dihadapi, sehingga penelitian ini sejalan dengan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) kriteria dalam mengevaluasi suatu kebijakan yakni efektivitas yaitu mengenai apakah hasil yang diinginkan telah tercapai, efisiensi yaitu mengenai seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil, kecukupan yaitu mengenai seberapa jauh pencapaian hasil dapat memecahkan masalah, pemerataan yaitu mengenai apakah manfaat disalurkan secara merata kepada masyarakat, responsivitas yaitu mengenai respon masyarakat terhadap bantuan yang diterima dan ketepatan yaitu mengenai apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna bagi masyarakat.

## Metode

Bentuk penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana peneliti menggambarkan suatu masalah dalam penelitian dan mencari jawaban atas masalah tersebut. Fokus utama dari penelitian ini adalah enam indikator evaluasi menurut William N. Dunn. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Tegalsari. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan terkait. Wawancara dilakukan dengan Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya, Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan tingkat kecamatan Kasi Kesra Kelurahan Tegalsari, Pendamping Program Keluarga Harapan di Kelurahan Tegalsari, serta Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Oleh karena itu, untuk memperkuat hasil penelitian, diperlukan dokumentasi penelitian yang mencakup

data langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari informan terkait dengan penelitian tersebut. Teknik analisis data yang akan digunakan melibatkan proses reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai efisiensi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Tegalsari.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Efektivitas

Pada kriteria efektivitas dari Program Keluarga Harapan di Kelurahan Tegalsari dapat dianggap efektif jika dalam pelaksanaannya berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan (Dunn, 2003) dalam (Mustari, 2015) yakni kemampuan suatu tindakan atau alternatif dalam mencapai hasil yang diinginkan atau tujuan yang ditetapkan. Selain itu, efektivitas juga penting untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Tegalsari dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH dijelaskan bahwa tujuan program untuk Kelurahan Tegalsari yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Meningkatkan taraf hidup serta mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan.**

Berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) memberikan dampak positif, seperti yang terlihat pada kasus Ibu Ofita, yang merupakan ketua KPM RT 5 RW 7. Bantuan PKH yang diterimanya untuk keperluan pendidikan anaknya dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan komponen bantuan yang diberikan. Dengan demikian, bantuan tersebut mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga serta dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, seperti modal usaha.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa melalui kegiatan P2K2, para KPM diajarkan bagaimana memanfaatkan bantuan dengan tepat sesuai komponen yang diberikan, sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga. Hal ini juga sesuai dengan indikator peningkatan taraf hidup yang dikemukakan oleh (Soetomo, 2009), yaitu kemampuan KPM untuk menggunakan keuangan dengan baik sesuai komponen bantuan yang diterima, sehingga dapat memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

#### **b. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM**

Berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di kelurahan Tegalsari tidak berhasil secara optimal dalam mencapai tujuan perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat. Terlihat bahwa masih banyak warga Kelurahan Tegalsari yang terdaftar sebagai KPM yang sebenarnya sudah mampu, namun enggan untuk mengundurkan diri dari daftar penerima, serta banyak warga

yang bergantung pada bantuan PKH tanpa upaya mandiri yang memadai. Hal ini menggambarkan bahwa program PKH di kelurahan Tegalsari belum efektif dalam mencapai tujuan untuk mendorong perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat, karena tidak memenuhi prinsip-prinsip kemandirian sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Asrori, 2020) yakni kemandirian merujuk pada perilaku individu yang memiliki inisiatif untuk melakukan berbagai tugas guna memenuhi kebutuhan tanpa tergantung pada orang lain, serta melakukannya dengan tanggung jawab.

### c. Mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang ada, menunjukkan bahwa bantuan PKH yang disediakan oleh pemerintah memiliki potensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, seperti yang terlihat dari penurunan jumlah KPM di beberapa kelurahan. Namun, meskipun terjadi perubahan tersebut, bantuan PKH masih belum berhasil secara efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. Fakta ini juga terlihat di kelurahan Tegalsari, dimana jumlah KPM yang menerima bantuan PKH mengalami peningkatan yang signifikan selama periode 2021-2022. Hal ini menunjukkan bahwa program PKH di kelurahan Tegalsari belum berhasil mencapai tujuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yakni dengan adanya Program ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan. Perlu dilakukan evaluasi serta peningkatan program agar dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tabel 1. Rekap Data Keluarga Penerima Manfaat 2021-2022

Tahun	Kelurahan	Jumlah KPM
2021	Dr. Soetomo	1112
	Kedungdoro	2115
	Keputran	773
	<b>Tegalsari</b>	<b>2310</b>
	Wonorejo	1513
2022	Dr. Soetomo	617
	Kedungdoro	897
	Keputran	588
	<b>Tegalsari</b>	<b>2849</b>
	Wonorejo	804

Sumber: Koordinator PKH Kota Surabaya Dinas Sosial Kota Surabaya, 2023

Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan pelatihan dan modal usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka sendiri dan mengurangi ketergantungan pada bantuan. Dengan mengimplementasikan solusi tersebut, diharapkan tingkat efektivitas PKH di Kelurahan Tegalsari dapat ditingkatkan dan program ini dapat memberikan dampak positif yang lebih signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan analisis peneliti terhadap program PKH di Kelurahan Tegalsari, terungkap bahwa program tersebut belum berhasil mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan, termasuk peningkatan taraf hidup, pengurangan beban pengeluaran, perubahan perilaku dan kemandirian, serta pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Tingkat efektivitas PKH di Kelurahan Tegalsari masih belum mencapai tingkat yang memadai. Pandangan peneliti diperkuat dengan mendasarkan pada konsep teori perubahan perilaku yakni teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang dapat berhubungan dengan masalah PKH di Kelurahan Tegalsari. Teori ini menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kendali perilaku yang dirasakan. Dalam konteks PKH, sikap individu terhadap program PKH menjadi faktor penting, dimana pandangan positif terhadap program dapat mendorong partisipasi dan manfaat yang diperoleh. Norma subjektif juga berperan, dengan dukungan dan persepsi positif dari masyarakat sekitar memengaruhi motivasi individu untuk terlibat. Selain itu, kendali perilaku yang dirasakan mempengaruhi kemampuan individu dalam memanfaatkan bantuan dan meningkatkan kemandirian. Dalam analisis masalah PKH di Kelurahan Tegalsari, teori ini membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, penerimaan, dan efektivitas bantuan PKH serta membantu memahami faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan program tersebut.

## 2. Efisiensi

Kriteria efisiensi dapat dipahami sebagai cara untuk mengevaluasi seberapa baik suatu kebijakan atau program menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dunn dalam (Mustari, 2015) yakni berkaitan dengan seberapa banyak upaya yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan tertentu. Dengan kata lain, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, semakin efisien pelaksanaan program atau kebijakan tersebut. Oleh karena itu, efisiensi terkait dengan seberapa banyak upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh program PKH. Pada pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari, menurut (Rusydiana, 2018) sumber daya yang dibutuhkan yaitu sumber daya manusia, sumber daya waktu seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut.

### a. Sumber daya manusia

Berdasarkan temuan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dalam hal kompetensi sumber daya manusia, telah dipilih sumber daya manusia yang ditugaskan sebagai pendamping PKH di Kelurahan Tegalsari yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan proses rekrutmen dengan yang telah ditetapkan yakni memenuhi syarat administratif seperti lulusan minimal D-III/D-IV/Sarjana Ilmu Sosial dan pengalaman kerja di bidang sosial/kesejahteraan serta mampu menggunakan *Ms Office*. Pernyataan ini sejalan dengan indikator kompetensi sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Hutapea dalam (Kadji, 2015), yaitu

memiliki pengetahuan dan pemahaman yang relevan dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam jumlah sumber daya manusia yang tidak seimbang dengan jumlah KPM yang sangat tinggi. Hal ini mengakibatkan pendampingan yang dilakukan tidak berjalan secara maksimal.

#### **b. Sumber daya waktu**

Berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan kriteria efisiensi pada pelaksanaan kelurahan Tegalsari menunjukkan bahwa didalam aspek sumber daya waktu terutama dalam kegiatan P2K2 kurang maksimal, dikarenakan pertemuan P2K2 hanya dilakukan sekali dalam sebulan dan dijadwalkan melalui koordinasi dengan ketua kelompok. Karena hanya ada satu pendamping, pertemuan dilakukan secara bergantian antara kelompok-kelompok yang sudah dibentuk. Keterbatasan waktu pertemuan membuat beberapa anggota KPM tidak sepenuhnya memahami materi yang disampaikan. Akibatnya, ketua kelompok harus bertanya kepada pendamping serta menjelaskan kembali kepada anggota KPM yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan waktu belum efisien dalam kegiatan P2K2 karena tidak seimbang antara jumlah KPM dan jumlah pendamping yang ada sehingga tidak sesuai dengan kriteria efisiensi yang dikemukakan oleh Dunn dalam (Mustari, 2015) yakni berkaitan dengan seberapa banyak upaya yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan tertentu. Dengan kata lain, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, semakin efisien pelaksanaan program atau kebijakan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan kriteria efisiensi, pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari belum mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan analisis peneliti, pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari belum mencapai tujuan yang diharapkan karena ketidakseimbangan jumlah pendamping dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang mengakibatkan pendampingan yang tidak efisien. Diperlukan peningkatan jumlah pendamping yang seimbang dengan jumlah KPM serta efisiensi dalam kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Keluarga (P2K2) agar tujuan PKH dapat tercapai. Pandangan ini didukung oleh konsep Teori Sumber Daya Manusia (Gary Dessler, 2015), yang menekankan pentingnya sumber daya manusia yang memadai dalam mencapai keberhasilan suatu program.

### **3. Kecukupan**

Kecukupan dapat diartikan sebagai kriteria yang berhubungan dengan hasil dari suatu kebijakan untuk mengatasi masalah. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dunn yakni kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya permasalahan. PKH menjadi suatu inovasi baru untuk mengurangi dan menanggulangi permasalahan kemiskinan, program ini juga menjadi salah satu instrumen untuk memperbaiki kekurangan dari program bantuan



sebelumnya. Kebijakan PKH ini dapat memenuhi kriteria kecukupan apabila dapat mengurangi bahkan mengentaskan masyarakat tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk membiayai pendidikan sekolah.

Program bantuan PKH di Kelurahan Tegalsari belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah putus sekolah yang tinggi. Dari pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kelurahan Tegalsari belum memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Data kecamatan menunjukkan bahwa jumlah anak putus sekolah masih tinggi, hanya sekitar 10% dari masyarakat dengan bantuan anak sekolah yang mendapatkan bantuan PKH.

Berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan PKH di Kelurahan Tegalsari belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah putus sekolah yang tinggi. Dari pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kelurahan Tegalsari belum memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Data kecamatan menunjukkan bahwa jumlah anak putus sekolah masih tinggi, hanya sekitar 10% dari masyarakat dengan anak sekolah yang mendapatkan bantuan PKH. Selain itu, program-program pemerintah kota lainnya juga belum secara efektif menangani masalah ini. Meskipun bantuan PKH memberikan manfaat dalam mengurangi beban pengeluaran keluarga, masih ada kendala yang menghambat penanggulangan putus sekolah secara efektif. Faktor-faktor seperti lingkungan dan pergaulan juga memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat putus sekolah. Hal tersebut belum memenuhi teori Kapabilitas Manusia (*Human Capability Theory*) yang dikemukakan oleh Sen, 1999 dalam (Wackernagel et al., 2021) yang menekankan untuk meningkatkan kapabilitas manusia dengan memberikan bantuan finansial, serta diperlukan pendampingan yang dapat mengurangi dampak lingkungan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Di sisi lain dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak juga belum memenuhi Teori Keterlibatan Orang Tua (*Parental Involvement Theory*), teori ini menekankan pentingnya peran orang tua dalam meningkatkan prestasi dan motivasi belajar anak. Dengan bantuan PKH, orang tua dapat lebih aktif terlibat dalam kegiatan sekolah dan memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh anak-anak dalam pembelajaran.

#### **4. Perataan**

Kriteria perataan merujuk pada kesetaraan hak dan kedudukan setiap kelompok sasaran dari kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dunn yakni perataan berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat usaha antara kelompok yang berada di dalam masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH di Kelurahan Tegalsari belum sepenuhnya memenuhi kriteria perataan karena belum menjangkau seluruh penerima yang membutuhkan. Berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari, dapat disimpulkan bahwa program bantuan PKH belum berhasil terdistribusi secara

merata, sesuai dengan kriteria perataan yang dikemukakan oleh (Ayu Nurrohmah & Rahaju, 2019) yang melihat dari penyebaran bantuan PKH kepada setiap masyarakat miskin di wilayah Kelurahan Tegalsari, bantuan PKH dapat dinilai merata apabila dalam kondisi dilapangan Hal ini terlihat dari penyebaran bantuan PKH yang belum menjangkau setiap masyarakat miskin di wilayah Kelurahan Tegalsari. Selain itu, perataan bantuan PKH juga dapat diukur dengan keakuratan dalam menetapkan penerima manfaat sehingga tidak ada individu yang tidak memenuhi kriteria miskin namun masih menerima bantuan PKH tersebut.

Berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari belum berhasil terdistribusi secara merata, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor hambatan, seperti ketidakakuratan data penerima bantuan PKH pada Kelurahan Tegalsari yang tidak selalu diperbarui dari pusat, sehingga keluarga yang sebenarnya sudah mampu masih menerima bantuan tersebut. Selain itu, keterbatasan wewenang Dinas Sosial sebagai perpanjangan tangan dalam pelaksanaan program juga menjadi penghambat. Hal tersebut belum memenuhi kriteria perataan yang dikemukakan oleh (Ayu Nurrohmah & Rahaju, 2019) yang melihat dari penyebaran bantuan PKH kepada setiap masyarakat miskin di wilayah Kelurahan Tegalsari, bantuan PKH dapat dinilai merata apabila dalam kondisi dilapangan Hal ini terlihat dari penyebaran bantuan PKH yang belum menjangkau setiap masyarakat miskin di wilayah Kelurahan Tegalsari. Selain itu, perataan bantuan PKH juga dapat diukur dengan keakuratan dalam menetapkan penerima manfaat sehingga tidak ada individu yang tidak memenuhi kriteria miskin namun masih menerima bantuan PKH tersebut.

## **5. Responsivitas**

Kriteria responsivitas mengukur sejauh mana suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dunn yakni Responsivitas berhubungan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, dan nilai kelompok masyarakat tertentu, kelompok sasaran memberikan tanggapan terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan, yang dapat berupa respons positif atau negatif. Dalam temuan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari kriteria responsivitas. Menurut (Dehani et al., 2018), sasaran kajian dibagi menjadi dua aspek. yaitu mengenai pengetahuan KPM terhadap keseluruhan tahapan dan proses pelaksanaan program. serta kepuasan para penerima bantuan terhadap proses pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari.

### **a. Pengetahuan peserta PKH terhadap keseluruhan tahapan proses pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari**

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang dilakukan pada pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari, menunjukkan bahwa para penerima bantuan telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang tahapan proses pelaksanaan PKH. Mereka para

KPM mengakui bahwa melalui kegiatan P2K2, mereka memperoleh pemahaman tentang cara mengambil bantuan, mengelola dan mengatur bantuan yang diterima, serta manfaat yang bisa didapatkan dari program PKH. Hal tersebut sesuai dengan Teori Pendidikan Partisipatif yang dikemukakan oleh John Dewey dalam (Mualifah, 2016) yang menekankan pentingnya partisipasi aktif peserta dalam proses pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik. Dalam konteks ini, kegiatan P2K2 yang diadakan secara rutin memberikan kesempatan kepada peserta PKH untuk terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran tentang tahapan proses pelaksanaan PKH.

#### **b. Kepuasan peserta PKH terhadap keseluruhan tahapan proses pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari**

Berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan penerima bantuan PKH di Kelurahan Tegalsari merasa senang dengan program tersebut. Meskipun bantuan tersebut tidak mencukupi sepenuhnya, tetapi dapat membantu mengurangi pengeluaran mereka. Orang-orang yang menerima bantuan mengakui bahwa PKH memberikan manfaat positif bagi kehidupan ekonomi mereka. Hal ini sesuai dengan teori kepuasan konsumen yang dikemukakan oleh Philip Kotler dalam (Muhtadi & Indah Choirunnisa, 2019). Teori tersebut mengungkapkan bahwa kepuasan konsumen dapat diukur melalui ungkapan langsung kepuasan penilaian terhadap atribut yang dirasakan, dan analisis masalah. Dalam konteks ini, penelitian menunjukkan bahwa mayoritas penerima bantuan PKH merasa puas dengan program tersebut, meskipun masih ada kekurangan. Dengan memahami hal ini, pemerintah dan penyelenggara program PKH dapat terus meningkatkan pelaksanaan program untuk memberikan kepuasan yang lebih baik kepada para penerima bantuan dan memperbaiki kehidupan ekonomi mereka.

Berdasarkan analisis peneliti terhadap pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari dapat dianalisis dengan mempertimbangkan beberapa teori yang relevan. Peneliti menyatakan bahwa pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari telah mendapatkan respon positif dari KPM. Responsivitas yang baik dalam kebijakan atau program pemerintah dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan taraf hidup mereka. Selain itu, evaluasi terhadap kinerja pendamping PKH yang disarankan oleh Ketua RW setempat. Evaluasi tersebut membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan program serta memperbaiki kurangnya komunikasi dan koordinasi. Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan untuk mempermudah pemahaman masyarakat tentang proses penerimaan bantuan PKH juga penting, dan dapat dikaitkan dengan teori kognitif menurut Jean Piaget dalam (Rahman & Rahman, 2019). Piaget berpendapat bahwa anak-anak mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui proses konstruksi pengetahuan yang aktif. Dalam konteks PKH, pendekatan Piaget dapat digunakan untuk memahami bagaimana keluarga penerima manfaat PKH dapat membentuk pemahaman mereka tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan masa depan. Dengan demikian, teori

kognitif sangat relevan dalam menganalisis pandangan peneliti tentang pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari.

## **6. Ketepatan**

Kriteria ketepatan dapat diartikan sebagai suatu penilaian apakah alternatif kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang sesuai bagi kelompok sasaran. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Dunn yakni ketepatan terkait dengan nilai atau nilai ekonomi dari tujuan program dan kekuatan asumsi yang mendukung tujuan tersebut. Kriteria ini mengevaluasi dampak yang mungkin dihasilkan oleh setiap alternatif yang dipertimbangkan, baik dampak positif maupun negatif. Dengan demikian, kebijakan akan dianggap tepat atau sesuai hanya jika alternatif yang dipilih menghasilkan dampak yang positif. Namun, jika dampak yang dihasilkan adalah negatif, maka kebijakan tersebut dianggap tidak tepat dan perlu dicari alternatif yang baru. Oleh karena itu, kebijakan PKH di Kelurahan Tegalsari akan dianggap tepat jika berhasil memberikan manfaat kepada KPM di sana..

### **a. Ketepatan sasaran penerima di Kelurahan Tegalsari dengan kriteria PKH yang telah ditetapkan**

Berdasarkan temuan hasil penelitian, kriteria ketepatan untuk masyarakat miskin dan rentan yang menerima bantuan PKH di Kelurahan Tegalsari masih belum optimal. Karena terdapat beberapa faktor yang menghambat masyarakat yang membutuhkan untuk menerima bantuan tersebut. Pendamping PKH juga berpendapat bahwa program ini sudah mengenai sasaran yang tepat karena diberikan kepada kelompok- kelompok tertentu yang memenuhi kriteria, seperti anak usia sekolah, ibu hamil hingga menyusui, lansia, dan disabilitas, hanya saja data penerima terkadang dari pusat masih mencakup penerima yang telah mampu dan seharusnya sudah tidak masuk dalam data penerima. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang disampaikan oleh (Budiani & Ni Wayan, 2007), yang menyatakan bahwa ketepatan sasaran program dilihat dari sejauh mana peserta program sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

### **b. Ketepatan proses pelaksanaan PKH dengan harapan para penerima PKH di Kelurahan Tegalsari**

Berdasarkan temuan hasil penelitian pada pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari menunjukkan bahwa ada keberagaman pandangan terkait ketepatan proses pelaksanaan PKH. Sebagian penerima merasa puas dengan pelaksanaan program ini karena bantuan PKH telah membantu mengurangi beban keuangan dan memberikan manfaat yang signifikan dalam kehidupan mereka. Mereka merasa terbantu dan bersyukur atas adanya bantuan ini. Namun, terdapat juga beberapa pandangan kritis terkait ketepatan proses pelaksanaan PKH. Beberapa penerima merasa bahwa masih ada kekurangan dalam penentuan penerima bantuan, di mana ada keluarga yang mampu tetapi terdaftar sebagai penerima, sementara keluarga yang lebih membutuhkan tidak terdaftar. Ini menunjukkan adanya potensi ketidakakuratan dalam penentuan penerima bantuan PKH, Hal tersebut tidak sesuai dengan teori

Keadilan Distributif (*Distributive Justice Theory*) adalah John Rawls dalam (Fattah, 2013) yang menekankan pentingnya pembagian yang adil untuk mencapai keadilan sosial dan meminimalkan ketimpangan yang tidak adil di antara individu atau kelompok dalam masyarakat.

Berdasarkan analisis peneliti terhadap pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari dapat dianalisis dengan mempertimbangkan beberapa teori yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa program ini masih belum berhasil dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, kecuali dalam hal responsivitas yang lumayan baik. Masih terdapat beberapa masalah, seperti kurangnya sumber daya manusia dan waktu yang menghambat pendidikan dan sosialisasi. Selain itu, ada juga masalah dalam penyaluran bantuan PKH yang tidak merata, sehingga beberapa orang yang seharusnya mendapat bantuan tidak mendapatkannya karena masalah data yang tidak sesuai. Meskipun begitu, penerima manfaat PKH telah menunjukkan keaktifan dan responsivitas dalam pertemuan pendampingan, meskipun ada beberapa keluhan tentang ketidaksesuaian sasaran kebijakan. Dalam menganalisis hal ini, teori seperti implementasi kebijakan yang efektif. Penerapan teori implementasi kebijakan yang identik dengan perspektif "*Top-Down*" dan "*Bottom-Up*" Edward III dalam (Agustino, 2016) menjadi relevan. Pemerintah pusat perlu memberikan panduan yang jelas tentang penyaluran bantuan, kriteria penerima manfaat, dan mekanisme pengawasan. Di sisi lain, pelaksana lokal di Kelurahan Tegalsari memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi masyarakat setempat. Mereka dapat berperan dalam mengidentifikasi keluarga yang memenuhi syarat, memberikan edukasi, dan memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pelaksana lokal menjadi kunci dalam implementasi kebijakan PKH yang efektif di Kelurahan Tegalsari, dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di tingkat lokal serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil analisis dari keenam kriteria evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari belum efektif dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, terlihat dari masih banyaknya jumlah KPM di Kelurahan tersebut. Selain itu, efisiensi kebijakan PKH juga belum cukup baik karena kurangnya sumber daya manusia dan waktu yang mempengaruhi pelaksanaan edukasi dan sosialisasi. Kebijakan ini juga masih kurang merata, karena beberapa masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan PKH karena masalah dalam ketidaksesuaian data. Meskipun demikian, KPM telah menunjukkan responsif dan aktif dalam pertemuan pendampingan, meskipun ada beberapa protes terkait ketidaksesuaian sasaran kebijakan.

Pada studi (Ade Kurniawan et al., 2021) yang juga membahas tentang Evaluasi PKH berbeda dengan hasil yang peneliti lakukan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Karawang dinilai dari beberapa indikator evaluasi secara keseluruhan sudah

memenuhi yaitu, efektifitas, kecukupan. Sedangkan indikator lainnya masih belum memenuhi yaitu efisiensi, perataan dan ketepatan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan masih ditemui beberapa kendala yaitu kurangnya Sumber Daya PKH, susahnya merubah cara pola pikir KPM, dan persebaran bantuan yang tidak merata.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menguak sejumlah aspek penting terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tegalsari dengan menggunakan pendekatan evaluasi William N. Dunn. Efektivitas PKH di wilayah ini masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Meskipun berhasil meningkatkan taraf hidup dan mengurangi pengeluaran serta meningkatkan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sasaran lain seperti perubahan perilaku dan penguatan kemandirian KPM serta pengurangan kemiskinan dan kesenjangan masih belum sepenuhnya tercapai. Di sisi efisiensi, kendala muncul karena tidak seimbangnya jumlah sumber daya manusia yang terlibat dibanding jumlah KPM. Penjadwalan waktu pelaksanaan dan pertemuan yang tidak teratur juga menjadi hambatan. Ketidacukupan dalam mengatasi putus sekolah serta ketidakmampuan dalam menjangkau keluarga miskin dan rentan menjadikan aspek kecukupan dan perataan masih belum memenuhi harapan. Responsivitas PKH di Kelurahan Tegalsari dinilai baik, tetapi terdapat keterbatasan komunikasi dengan pejabat setempat serta kejelasan proses pendaftaran bantuan. Terakhir, ketepatan sasaran program masih menjadi tantangan, dengan data penerima yang tidak akurat dan belum mampu memastikan bahwa hanya yang memenuhi syarat yang menerima bantuan.

Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Fokus penelitian pada satu kelurahan dapat menghasilkan temuan yang mungkin tidak sepenuhnya representatif untuk wilayah yang lebih luas. Terbatasnya jumlah responden dan informan juga dapat mempengaruhi kedalaman analisis. Selain itu, dalam menganalisis efektivitas, sebaiknya ada pengukuran yang lebih kuantitatif terkait indikator keberhasilan program. Dalam konteks ini, penelitian ini menjadi landasan penting untuk riset lanjutan yang lebih inklusif dan beragam dalam konteks geografis serta metode analisis yang lebih komprehensif, untuk menghasilkan pemahaman yang lebih akurat dan berkelanjutan mengenai pelaksanaan program bantuan sosial di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis terkait kebijakan PKH di Kelurahan Tegalsari dapat dievaluasi dari efektivitas kebijakan program menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari masih belum mampu dan belum efektif dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ini terbukti dengan jumlah KPM yang masih banyak di Kelurahan Tegalsari. Serta, dilihat efisiensi kebijakan PKH di Kelurahan Tegalsari belum cukup efisien, karena sumber daya manusia, sumber daya waktu belum sepenuhnya memberikan pelaksanaan yang terbaik, dengan kurangnya jumlah sumber daya manusia sebagai pendamping dalam pelaksanaan edukasi dan

sosialisasi sehingga menyebabkan kurang maksimalnya waktu pertemuan yang secara tidak langsung mempengaruhi pemahaman KPM. Kemudian, pada kriteria perataan kebijakan masih dinilai kurang merata, karena masih terdapat masyarakat yang tergolong kurang mampu tetapi tidak mendapatkan bantuan PKH. Hal tersebut disebabkan karena adanya masalah dalam ketidaksesuaian data. Pada realitas yang ada, KPM sebagai sasaran dari PKH, sudah menunjukkan sikap yang baik karena responsif dan aktif dalam pelaksanaan pertemuan pendampingan, meskipun dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Tegalsari masih terdapat protes yang dilakukan terkait dengan ketidaksesuaian dari ketepatan sasaran kebijakan yang telah diberikan.

## Referensi

- Ade Kurniawan, Lukmanul Hakim, & Rachmat Ramdani. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 4, 41–51.
- Ayu Nurrohmah, I., & Rahaju, T. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. *Publika*, 7(7), 1–7.
- Budiani, & Ni Wayan. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 2(1).
- Dehani, M., Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2018). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Evaluation Of Keluarga Harapan Program (Pkh) In South Bogor District Of Bogor City*.
- Firdausi, D. S., & Hertati, D. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1126. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2323>
- Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. . In *Gorontalo: UNG Press Gorontalo*.
- Mualifah, I. (2016). Progresivisme John Dewey Dan Pendidikan Partisipatif Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 1(1), 101–121. <https://doi.org/10.15642/jpai.2013.1.1.101-121>
- Muhtadi, & Indah Choirunnisa. (2019). Implikasi Kualitas Pelayanan Program Keluarga Harapan terhadap Kepuasan Penerima Manfaat di Kelurahan Beji Depok. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 3(2), 397–424.
- Mun'im, A. (2022). Penyempurnaan Pengukuran Kontribusi Pariwisata: Alternatif Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.47608/jki.v16i12022.1-14>

- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. *LeutikaPrio*.
- Royat, S. (2015). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Kajian Bidang Kesejahteraan Masyarakat*, 1, 41–51.
- Rusydiana, A. S. (2018). Indeks Malmquist untuk Pengukuran Efisiensi dan Produktivitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 26(1), 47–58.
- Sudirman, F. A., Basri, M., Huda, K., & Upe, A. (2020). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI UPAYA PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS). *Jurnal Neo Societal*, 5(4), 381–394.
- Sari, W., Prayendi, D. A., Aulia, R. G., Idzni, H., Yunus, S. M., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(1), 1–10.
- Wackernagel, M., Hanscom, L., Jayasinghe, P., Lin, D., Murthy, A., Neill, E., & Raven, P. (2021). The importance of resource security for poverty eradication. *Nature Sustainability*, 4(8), 731–738. <https://doi.org/10.1038/s41893-021-00708-4>
- Yustina. (2021). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu*. Universitas Muhammadiyah Makassar.